



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

PERAN CAMAT BATANG PERANAP DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA DESA KOTO TUO DENGAN DESA SELUNAK

Diajukan Sebagai Salah Satu Sarat Guna Mendapatkan Gelar Serjana (S1) Pada
Jurusan Adminitrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negri Sultan Syarif Kasim Riau

DISUSUN OLEH

KARDO HANDIKA
NIM.11575105222

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINITRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Kardo Hanika
NIM : 11575105222
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : PERAN CAMAT BATANG PERANAP DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL BATAS
ANTARA DESA KOTO TUO DENGAN DESA
SELUNAK.

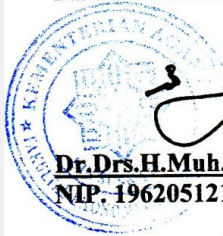
Disetujui oleh
Dosen Pembimbing


Dr. Hj. Siti Rahma, M. Si

NIP. 19640508 199303 2 002


Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial




Dr. Drs. H. Muh. Sa'id. HM, M. Ag, MM
NIP. 196205121989031003

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Kamaruddin S. Sos. M. Si
NIP. 197901012007101003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KARDO HANDIKA
NIM : 11575105222
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN CAMAT BATANG PERANAP DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL BATAS
ANTARA DESA KOTO TUO DENGAN DESA
SILUNAK

HARI/TANGGAL UJIAN: JUM'AT/18 OKTOBER 2019

PANITIA PENGUJI
KETUA

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP: 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I

Drs. H. Almasri, M.Si
NIP: 19670801 200501 1007

PENGUJI II

Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
NIP: 19811030 200710 2 004

ABSTRAK

Peran Camat Batang Peranap Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antara Desa Koto Tuo Dengan Desa Selunak

Oleh :

Kardo handika

Nim 11575105222

Email kardohandika@gmail.com

Peneletian ini dilakukan kepada pemerintahan kecamatan batang peranap, desa koto tuo dan desa selunak terdapat beberapa masalah yang membuat peneliti ingin melekukan penelitian yakni masih tidak adanya kejelasan batas wilayah antara desa koto tuo dengan desa selunak husnya di desa selunak ehingga menyebabkan mal adminitrasi, tidak adnya pembangunan di dusun tersebut yang diakibatkan oleh kedua desa saling melempar tanggung jawab satu sama lain selain itu juga terjadi perusakan bagunan di dusun padang lalang seperti perusakan gapura dan gedung serba guna desa selunak yg dilakukan masarakat desa koto tuo di karenakan pada saat melekukan pembangunan pihak pemerintah desa selunak tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu sehingga terjadi lah perusakan bangunan tersebut.adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran camat batang peranap dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara desa koto tuo dengan desa selunak dan untuk mengetahui apa jasa yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan konflik tapal batas wilayah antara desa koto tuo dengan desa selunak kecamatan batang peranap. Penentu jumlah sampel diambil sebanyak 15 (lima beleas orang) berdasarkan teknik purposive sampling yang terdiri dari pihak kecamatan batang peranap, pihak desa koto tuo, pihak desa selunak, dam masarakat dusun padang lalang. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptip kualitatif yaitu menyampaikan hasil data yang di peroleh dari jawaban responden kemudian di analisa dengan menguraikan permasalahan yang ada sehingga memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa peran camatcamat batang peranap dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara desa koto tuo dengan desa selunak masih belum selesai sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1)persuasif atau musawarah, perundingan, dan mediasi. 2)koersif atau dengan cara kekerasan. Kedua indikator masih belum terlaksana sepenuhnya sehingga berdampak pada belum selesainya konflik tapal batas antara desa koto tuo dengan desa selunak sampai sekarang.

Kata kunci: peran, penyelesaian konflik, batas wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk sehingga dapat berkarya tanpa batas sebagai warisan untuk generasi-generasi selanjutnya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan yang bermartabat.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“peran camat batang peranap dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara desa koto tuo dengan desa selunak,”** merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada program Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari begitu banyak kendala dan cobaan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan Kerjasama dari berbagai keluarga, segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag, Wakil Rektor I Bapak Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Kusnedi, M. Pd, Wakil Rektor III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi ini.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Drs, H. Muh. Said, M. Ag, beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Leny Nofianti, M. S., S. E., M. Si., Ak, Wakil Dekan II Ibu Dr. Julina, S. E, M. Si, serta Wakil Dekan III Bapak Dr. Amrul Muzan, S. HI, M. Ag, dan Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah member rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

3. Ketua perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau berserta karyawan dan ketua perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan karyawan yang telah mengizinkan penulis untuk membaca, meminjam buku yang ada di perpustakaan.

Ketua Jurusan Administrasi Negara Bapak Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si, beserta Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Ibu Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP, yang telah meng-Acc judul penelitian ini.

Penasehat Akademik penulis Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Sc yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi anak didiknya.

Pembimbing Skripsi penulis Dra, Hj Siti Rahmah M.Si yang telah memberikan kemudahan, bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis dari awal proposal hingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Penguji Prososal penulis Devi Dewimar, S.Sos, M.Si sebagai penguji I dan Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si sebagai penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji proposal penulis Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik yang telah berjasa dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Kedua orangtua yang paling istimewa Ayahanda Abu Kasim, Ibunda Supiati yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan, membimbing dan senantiasa menitipkan nama ananda didalam setiap doanya, serta saudara kandung penulis Kakak Juliana,S.E terimakasih telah memberikan kepercayaan dalam menyelesaikan pendidikan ini dan menjadi sebagian dari hidup penulis.
10. Sahabat seperjuangan Administrasi Negara/F Angkatan 2015, sahabat Ben_Ten10, dan sahabat atau adik Aimra'at Aljanat Almuhtamilin yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Pekanbaru, juli 2019

UIN SUSKA RIAU

KARDO HANDIKA
NIM 11575105222

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 konsep peraan	16
2.2 konsep konflik	18
2.3 Konsep batas wilayah	26
2.4 Konsep kecamatan	30
2.5 konsep desa	33
2.6 konsep penyelesaian konflik	34
2.7 penelitian terdahulu	39
2.8 definisi konsep.....	40
2.9 Konsep Operasional.....	41
2.10 Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	45
3.3.1 Jenis Data	45
3.3.2 Sumber Data	45
a. Data Primer	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
1. Observasi	46
2. Wawancara	46
3. Dokumentasi.....	47
3.5 Informan Penelitian	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
4.1 Gambaran singkat kecamatan batang peranap.....	48
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	51
4.3 struktur Organisasi.....	52
4.4 visi, misi kecamatan batang peranap.....	52
4.5 tujuan dan sasaran camat batang peranap	55
4.6 gambaran umum desa koto tuo	55
4.7 gambaran umum desa selunak.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
5.1 Reponden Penelitian	59
5.2 Peranan camat batang peranap dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara desa koto tuo dengan desa selunak	60
5.2.1 persuasif.....	66
5.2.2 koersif	78
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	89
6.1 Kesimpulan	89
6.1.1 Peranan camat batang peranap dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara desa koto tuo dan selunak.....	89
6.1.2 faktor penghambat camat batang peranap dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara desa koto tuo dengan desa selunak	90
6.2 Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	jumlah kepala keluarga di desa koto tuo dan desa selunak...	7
Tabel 2.1	konsef operasional	38
Tabel 4.1	jumlah penduduk kecamatan batang peranap	46
Tabel 4.2	daftar mata pencarian masarakat batang peranap	47
Tabel 4.3	serana pendidikan di kecamatan batang peranap	47
Tabel 4.4	serana ibadah kecamatan batang peranap	48
Tabel 5.1	daftar informan peneliti	56
Tabel 5.2	jumlah penduduk desa koto tuo dan selunak di dusun padang lalang	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	41
Gambar 4.1	Struktur Organisasi desa koto tuo	53
Gambar 4.2	Struktur organisasi desa selunak.....	54



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki total luas wilayah sebesar 87.672,67 km², yang sebagian besarnya adalah bagian daratan. Dengan luas wilayah tersebut provinsi Riau memiliki 12 kabupaten/kota, 163 kecamatan, dan 241 kelurahan. Kabupten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki predikat Kabupaten Terbersih, dan kabupaten yang memiliki angka kemiskinan sangat kecil (2%).

Di Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 14 Kecamatan, salah satunya kecamatan Batang Peranap. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom.

Kecamatan adalah bagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan, kecamatan dipimpin oleh camat yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan daerah. Sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan wewenang yang bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota.

Camat telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

Hubungan dengan Pemerintah Desa, bersifat koordinatif dan fasilitatif (tidak lagi bersifat hirarkhis) tetapi desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kewenanga dan mengatur dirinya sendiri (*self governing community*), secara organisatoris desa tidak memiliki hubungan hirarkhis dengan kabupaten/kota, akan tetapi dilihat dari kepentingannya terdapat hubungan yang bersifat hirarkhis dengan melihat pada prinsip umum yang dipakai artinya bahwa kepentingan masyarakat yang lebih kecil tunduk pada kepentingan masyarakat luas;

pada hal prinsip utama dalam pendelegasian kewenangan adalah kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, karena memper`sulit pembiayaan yang pertanggungjawabannya;

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 di defenisikan desa adalah kesatuan masarakat hukum yang memiliki batas wilayaah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masarakat setempat berdasarkan prakarsa masarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, dalam permendagri no 45 tahun 2016 tentang pedoman dan penegasan batas Desa, dijelaskan tujuan dan penetapan dan penegasan batas desa untuk

menciptakan tertip administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ingir / punggung gunung / pegunungan / medan sungai dan / atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Adapun tata cara penetapan penegasan dan pengesahan bunyi bab v pasal 9 Permendagri no 45 tahun 2016 sebagai berikut: (1) Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di darat pada pedoman dokumen batas desa berupa peta rupa bumi, topografi, minuteplan, staatblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (2) Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang pembentukan daerah peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (3) Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati atau walikota dengan peraturan bupati atau walikota. (3) Peraturan bupati atau walikota sebagai mana dimaksud dengan ayat tiga memuat titik koordinat batas desa yg diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati atau walikota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan pemendagri no 45 tahun 2016 tentang pedoman dan pengesahan batas desa berpedoman pada peraturan permendagri nomor 27 tahun 2006 penetapan dan penegasan batas desa yang telah dicabut dan tidak menjadi pedoman dalam penetapan batas desa. Telah ditetapkan bahwa kepala desa harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan pusat maupun Daerah tersebut. Namun dari observasi yang dilakukan penulis melihat bahwa kepala desa di selunak maupun desa koto tuo belum menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.

Dalam konteks kehidupan negara kesatuan dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu di kembangkan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Serta daerah dengan antar kelompok masyarakat dalam lintas agama dan budaya. Guna mempererat, menumbuhkan semangat kesatuan, dan menghindari hal-hal yang akan terjadi dalam penerapan undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah salah satunya adalah sengketa tapal batas daerah, maka perlu kerja sama baik dan koordinasi yang berkesinambungan, antara pusat, daerah, kecamatan, dan dengan masyarakat.

Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas wilayah baik itu provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Perlu mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi terjadinya permasalahan konflik tapal batas, yang selalu cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, pembangunan, dan pemerataan pembangunan. Permasalahan tapal batas inilah yang kadang kala menimbulkan, konflik dan sengketa yang terjadi di perbatasan antara desa koto tuo dengan desa selunak kecamatan batang peranap kabupaten indragiri hulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila batas wilayah tidak jelas akan menyebabkan beberapa dampak negatif diantaranya adalah; suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing desa karena mereka beranggapan itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing desa saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, peleyanan masarakat, maupun pembangunan di bagian wilayah yg bersengketa tersebut khususnya di dusun padang lalang.

Desa yang satu yang dianggap melampaui batas wilayah kewenangannya sehingga berpotensi timbulnya konflik antar desa tersebut. Kekaburan batas desa juga dapat menimbulkan konflik antar desa seperti konflik sumber daya, konflik adminitrasi, dan konflik pisik. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan dan penegasan tapal batas sangat penting untuk dilaksanakan.

Namun demikian penetapan tapal batas secara pisik di lapangan bukan merupakan satu hal yang mudah meskipun penyelnggaraan adminitrasi desa tersebut berjalan dan berkembang sejak lahirnya negara kesatuan republik indonesia dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing-masing daerah, pada kenyataanya menentukan tapal batas dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah sering menimbulkan permasalahan antara desa-desa yang bersangkutan karena masing –masing pihak tidak dengan mudah sepakat begitu saja mengenai titik batas fisik yang di tentukan.

Demikian juga denganai batas antara desa koto tuo dengan desa selunak kecamatan batang peranap kabupaten indragiri hulu, secara pisik dilapangan yang belum jelas, yang artinya belum adanya kesepakatan antara kedua desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, bahkan terjadi semacam perbedaan yang berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan tapal batas antara desa koto tuo dengan selunak dari tahun 2007 sampai sekarang, permasalahan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis batas yuridis juga terjadi konflik fisik sehingga kesepakatan batas wilayah antara desa koto tuo dengan selunak.

Konflik tapal batas wilayah antara desa koto tuo dengan selunak telah terjadi dari 2007 sampai sekarang demikian juga informasi dapat dari berita **TRIBUNINHU.COM, RENGAT**, pemkab inhu sudah melakukan peninjauan kelokasi tapal batas antara Desa Koto Tuo dengan Selunak Kecamatan Batang Peranap hasilnya tim pemkap inhu yang berjumlah delapan orang sudah lima titik koordinat terkait tapal batas antara desa tersebut. (jum'at 23/3/2018).

Hingga saat ini mengenai batas desa antara desa koto tuo dengan selunak secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas di lapangan yang belum tergas, artinya ada kesepakatan antara kedua desa tersebut bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan tapal batas antara desa koto tuo dengan selunak hingga sekarang. Akibat tidak adanya penegasan batas wilayah oleh pihak kecamatan tersebut dapat menimbulkan konflik masarakat dengan masarakat,masarakat dengan aparaturnya. Dan desa antar desa.

Adapun aset yang di perebutkan oleh kedua desa tersebut adalah PDAM lahan kosong dimana di dusun tersebut banyak terdapat lahan kosong yang bisa digunakan untuk membuka lahan persawahan, dan perkebunan.

Tabel 1.1 jumlah kepala keluarga desa koto tuo dan selunak tahun 2018

NO	DESA	DUSUN	RW	RT	Jumlah Kepala Keluarga
1	Koto Tuo	2	2	4	77
2	Selunak	2	4	7	225

Sumber :desa koto tuo 2018

Jumlah seluruh kepala keluarga dari kedua desa tersebut adalah 302 kepala keluarga dimana masing- masing kedua desa tersebut mempunyai 2 dusun. Desa koto tuo mempunyai 2 RW, 4 RT dan 77 Kepala keluarga, sedangkan desa selunak mempunyai 4 RW, 7 RT dan 225 Kepala keluarga.

Ada pun luas wilayah dari desa koto tuo adalah 8,7km persegi dengan luas pemukiman 60 hektar, luas persawahan 15 hektar, luas perkebunan 160 hektar, luas perkantoran 2 hektar dan luas prasarana umum 5 hektar. Sedangkan luas wilayah desa selunak adalah 15,4km persegi dengan luas permukiman 120 hektar, luas persawahan 20 hektar, luas perkebunan, 300 hektar, dan perkantoran 5 hektar, dan luas perserana umum 8 hektar. Ada pun jumlah kepala keluarga yang tinggal di desa koto tuo dan selunak adalah 77 kepala keluarga desa koto tuo dan 225 kepala keluarga desa selunak.

Berdasarkan pengamatan langsung selama penulis melaksanakan kuliah kerja nyata lebih kurang enam minggu di Kecamatan Batang Peranap kabupaten Indragiri hulu khususnya di Desa Koto Tuo penulis menemukan keganjalan batas wilayah antara Desa Koto Tuo dengan selunak. yang tidak jelas dimana terdapat dusun di desa selunak dan koto tuo yang nama dusunya adalah Padang Lalang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana di dusun tersebut ada dua Desa sementara rumah mereka bersebelahan namun berbeda Desa yang menyebabkan pembangunan di dusun tersebut tidak berjalan seperti seharusnya hal ini di sebabkan karena kedua desa tersebut, melepas tanggung jawab antara satu dengan lainnya.

sehingga di dusun tersebut tidak terdapat pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, Masyarakat di dusun tersebut juga susah melakukan administrasi, karena kedua Desa tersebut seakan tidak peduli dengan permasalahan tersebut, selain itu masyarakat di dusun tersebut juga jarang mendapatkan bantuan seperti bantuan beras miskin (raskin), karena tidak di data oleh kedua desa tersebut, selain itu Suatu bagian wilayah terabaikan oleh masing-masing desa karena kedua desa tersebut merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar desa. Kekaburan batas desa juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar desa karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah sangat penting untuk dilaksanakan.

Selain permasalahan diatas pernah terjadi bentrok antara pemuda desa koto koto dengan pemuda desa selunak prihal perlombaan pembuatan gapura untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk perlombaan tujuh belasan, dimana pada saat itu pemuda selunak membuat gapura di dusun padang lalang, namun pemuda masarakat koto tuo tidak terima karena msarakat koto tuo merasa padang lalang tersebut termasuk wilayah mereka.ada pun bukti pernahnya terjadi konflik adalah menurut masarakat desa koto tuo PDAM tersebut terletak didesa koto tuo namun mnurut masarakat selunak PDAM tersebut terletak didesa mereka sehingga pernah terjadi bentrok akibat memperebutkan pdam tersebut sehingga ada beberpa kaca di pdam tersebut pecah

Gambar 1.1:

PDAM Yang Diperebutkan Oleh Kedua Desa Tersebut



Selain perusakan pdam juga terjadi perusakan di gedung serba guna yang dibangun oleh pemerintahan desa selunak, yang di bangun di dusun padang lalang oleh masarakat desa koto tuo perusakan tersebut dilakukan pda aalm hari kaca-kaca pada bangunan serbaguna tersebut dilempar batu sehingga pecah, hampir sama dengan kasus sebelumnya masarakat desa koto tuo tidak terima pemerintah desa selunak membangun membangun, gedung serbaguna di dusun adang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalan sebelum permasalahan tapal batas antara kedua desa tersebut selesai. Ada pun foto bukti perusakan gedung derbaguna sebagai berikut.

Gambar 1.2
Gedung serbaguna desa selunak



Selama konflik ini terjadi pihak kecamatan telah melakukan 4 kali musawarah dan mediasi dengan masarakat Desa Koto Tuo dan Desa Selunak untuk menyelesaikan konflik tapal batas antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak namun belum juga selesai sampai sekarang, adapun tanggal dan hasil

musawarah pihak kecamatan dengan masarakat desa koto tuo dengan desa selunak untuk menyelesaikan konflik tapal batas sebagai berikut.

No	Tanggal dan Tahun	Hasil Musawarah
1	24 September 2007	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kedua desa wajib mendata jumlah penduduk dusun padang lalang 2 Masarakat Koto Tuo tidak lagi melakukan perusakan 3 Masarakat Selunak tidak boleh membuat bangunan di dusun Padang Lalang sebelum konflik selesai
2	13 Mei 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pihak desa harus melibatkan Ninik Mamak dan memuka Adat untuk menyelesaikan konflik ini 2 Masing-masing kepala Desa harus menentukan batas wilayah yang pasti antara kedua Desa tersebut
3	2 Januari 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pihak kedua desa mendata penduduk dusun Padang Lalang yang mau bergabung ke Desa Koto Tuo dan yang tidak mau bergabung 2 Membentuk tim pelacakan tapal batas yang berjumlah 13 orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	14 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tetap membentuk tim pelacakan tapal batas yang berjumlah 13 orang 2 Kedua Desa harus membuat Peta Desa 3 Memanggil pihak Kabupaten untuk menyelesaikan konflik tapal batas antara kedua desa tersebut
---	--------------	---

Sumber kantor Camat Batang Peranap tahun 2017

Meskipun telah melakukan musawarah dan mediasi akan tetapi konflik tapal batas antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak juga belum selesai sampai sekarang.

Namun demikian, penetapan batas desa secara fisik dan pasti di lapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing-masing daerah.

Pada kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan. Demikian juga mengenai batas daerah antara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seandainya pemerintah daerah atau desa tidak menyelesaikan kasus tapal batas tersebut ditakutkan timbulnya konflik berkepanjangan antara kedua desa tersebut, dan Penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Sehingga Dari permasalahan diatas maka penulis berminat untuk mengambil judul Penelitian yaitu **“Peran Camat Batang Peranap Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antara Desa Koto Tuo Dan Desa Selunak”**

3.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah terjadi diatas maka adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah:

- 1.2.1 Bagaimana cara Camat Batang Peranap dalam menyelesaikan konflik batas wilayah antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak.
- 1.2.2 Apa Faktor penghambat dalam menyelesaikan konflik batas wilayah antara Desa Koto Tuo dan Desa Selunak

3.2 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagai mana Camat Batang Peranap dalam menyelesaikan kasus tapal batas antara Desa Koto Tuo dan Selunak.
- 1.3.2 Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan konflik batas wilayah Desa Koto Tuo dan Desa Selunak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Memberikan masukan atau informasi Kecamatan Batang Peranap tentang penyelesaian konflik tapal batas antara Desa Koto Tuo dan Desa Selunak.
- 1.4.2 Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang bermanfaat.
- 1.4.3 Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya jurusan administrasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa pasal, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori, definisi dan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang berhubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu serta menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisa data, serta definisi operasional.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang sejarah, visi dan misi, letak geografis, struktur organisasi dan kegiatan perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu mengenai Analisis pelaksanaan tugas camat dalam menyelesaikan konflik tampal batas antara desa koto tuo dengan selunak .

BAB VI : PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dari laporan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta saran dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Peran

Peran menurut Sarjono Soekanto (2015:212-213) adalah apa bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.

Levinson (dalam soekanto, 2015:213) mengemukakan peran mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peran dapat juga di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial kemasyarakatan

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Soekanto dapat penulis terjemakan bahwasanya peran adalah suatu keadaan dimana seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Narwoko (2010:160) menyebutkan, peran dapat membimbing seseorang dalam perilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memhidupkan sistem pengendali dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masarakat.

Hendropuspito dalam Narwako (2010:160) peran sosial yang ada di masarakat dapat diklarifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya susut pandang, berdasarkan macam-macam peran dapat sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Peran yang diharapkan (*expectd roles*): cara ideal dalam pelaksanaan peran menurut masarakat
- b. Peran yang disesuaikan (*actual roles*): yaitu cara bagaimana sebenarnya peran itu dijalankan Sementara itu berdasarkan cara memperoleh nya, peran dapat dijadikan menjadi:
 - a. Peran bawaan (*ascribed roles*,) yaitu peran yang di peroleh secara otomatis, bukan karena usaha.
 - b. Peran pilihan (*achives roles*,) yaitu peran yang di peroleh atas dasar keputusan sendiri.

Menurut Abdulsyani (2014:21). Peran sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan satus yang di miliknya.

Setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Peran menyebabkan seseorang pada batas- batas tertentu. Dapat meramalkan perbuatan orang lian, orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan prilaku sendiri dengan prilaku orang-orang, sekelomponya, peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Jadi, seseorang menduduki satu posisi dalam masarakat serta menjalankan satu peranan.

2.2 Konsep Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara *sosiologis*, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Kemudian Konflik juga merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan kelamin, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawah individu dalam satu interaksi. Perbedaan- perbedaan tersebut diantaranya adalah adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat keyakinan, dan lain sebagainya. Selain itu, konflik juga dapat disebabkan oleh perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda serta perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok.

Konflik dalam pengertian luas mencakup konflik secara fisik dan non fisik (lisan, pendapat, ide, dan kepentingan.) konflik dalam derajat yang longgar atau lemah misalnya perbedaan ide dan pendapat. konflik dalam derajat yang tinggi, seperti pertentangan fisik, kerusakan, revolusi, bahkan merusak keteraturan dan

ketertiban dalam masarakat. Namun,konflikdalam drajat yang longgar yang dapat memicu kemejuan. Oleh karena itu,tidak harus dipersepsikan hal yang buruk.

Setelah era perang dingin usai, dunia ternyata tidak segera aman dan damai, tetapi justru muncul konflik atau peraan dalam skala kecil yang tersebar dibatas wilayah. Banayak konflik terjadi karena perbedaan ras, dan etnis, seperti konflik bosnia-krosia, dan lain-lain. Dengan demikian konflik banyak menimbulkan tragedi kemenusiaan yang luar biasayang disebabkan oleh ulah manusia (Herimanto:2009:203)

2.2.1 Pengertian Konflik

Menurut A. M Harjuna konflik adalah perselisihan, pertentangan, percekcoan, merupakan pengalaman hidup yang mendasar. Karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin antara dua orang atau dua kelompok, dimana perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain sehingga salah satu atau keduanya menjadi saling terganggu.

Konflik sesungguhnya dapat memperkuat memperkuat identitas para anggota kelompok. Misalnya konflik antara indonesia dengan timur leste. Konflik ini dapat memperkuat identitas indonesia dan bangsa timur leste yang semula bersatu. Disisi lain, konflik dapat menetapkan kembali batas-batas etentitas dan geograpi kedua bangsa.

Gangga Persuat dan Terevor Turner mendefenisikan konflik sebagai percekcoan antara dua pihak atau lebih dalam mana satu pihak atau semuanya merasa adanya pengabaian terhadap hak, kepemillikan sumberdaya atau, ketiadaan kemampuan untuk memperoleh keadilan yang mengakibatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbulnya kemarahan, rasa terluka, kebencian, atau dapat pula berbentuk tindakan lisan atau perbuatan aksi atau reaksi yang dapat mengakibatkan kerusakan pada suatu pihak, baik secara emosi, fisik maupun benda.

Menurut Edward Azar (2007), menyebutkan ada 4 pra-kondisi yang mengarah pada terjadinya atau pemicu konflik internal, yaitu :

- a. hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas seperti suku, agama dan budaya dengan pemerintah. Pemerintah cenderung tidak mengakui eksistensi kelompok identitas tersebut dan bahkan berusaha mengeliminasinya demi kepentingan dan keutuhan negara. Akibatnya, terjadi pertentangan terhadap kelompok identitas tertentu dan mendorong para anggotanya untuk melakukan perlawanan terhadap Negara/pemerintah.
- b. konflik juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses kemiskinan. Proses secara ekonomi telah menciptakan kemiskinan sementara kekuatan ekonomi dan politik dari pusat menikmati surplus ekonomi sebagai hasil eksploitasi SDA di daerah-daerah yang dilanda konflik.
- c. sebab konflik internal berkaitan dengan karakteristik pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi politik dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pusat menyakini asumsi bahwa kekuasaan yang terpusat (sentral) menjamin kontrol yang efektif atas masyarakat. Bahkan kekuatan militer digunakan terhadap setiap bentuk protes atau perlawanan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang otoriter. Pemerintah daerah juga tidak dapat berfungsi sebagai alat perjuangan kepentingan masyarakat daerah dikarenakan elit-elit daerah ikut menikmati eksploitasi SDA.

- d. Keempat, konflik internal dikaitkan dengan *International Linkages*, yaitu sistem ketergantungan yang terjadi antara negara dengan sistem ekonomi global dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk lokal. Misalnya, dalam rangka melindungi kepentingan investor asing pemerintah rela menindas rakyatnya sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

Andi Yusran (2003:67) konflik adalah gejolak sosial yang selalu terdapat dalam setiap masyarakat. Konflik diartikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Konflik seperti ini dapat dikatakan lisan atau konflik non fisik, jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan maka dapat akan meningkat menjadi konflik fisik yaitu melibatkan benda-benda fisik dalam perbedaan pendapat.

Maurise Duvarge (dalam Andi Yusran, 2003:70) menyimpulkan salah satu sebab terjadinya konflik adalah yang terjadi pada tingkat individual. Rasa dwifrustasi merupakan salah satu aspek individual penyebab terjadinya konflik pada tingkat kolektif pada isu perbedaan kelas yang membedakan sebuah kelas dengan kelas lain dapat memicu menjadi konflik serta adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber dari potensi yang langka. Sejalan dengan pendapat Maurise Duvarge, sejak bergulirnya program otonomi daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka daerah dituntut bisa mengidupi diri sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). untuk kepentingan PAD tersebut, selain diperoleh dari retribusi, dan pajak daerah, eksplorasi sumber daya alam yang ada didaerah menjadi pilihan. Konon dalam menggali SDA itulah, banyak terjadi persinggungan kepentingan, dalam arti lain, kerap SDA itu antara batas wilayah masing-masing daerah, baik di desa, Kabupaten/kota maupun antar provinsi.

Lewis Coser (1956:16-19) dalam bahasa ahli teori (Bahasa Amerika) yang berawal, menyatakan pemahaman mereka tentang konflik sebagai kesadaran yang tercermin dalam semangat pembaharuan masyarakat.(Margaret,2003:106).

2.2.2 Konflik Politik

Teori konflik politik yang telah dikemukakan oleh banyak ahli sosiolog antara lain Karl Marx, Ralf Dahrenrof George simmel, dan Lewis Coser. Teori konflik politik yang digagas oleh Karl Marx didasari pada kekecewaannya pada sistim ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengelaploitasi buruh. Bagi Karl Marx dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan, yaitu kaum Borjuis yang menguasai sarana ekonomi dan kaum prolentar atau kaum buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Antara kedua kaum ini selalu terjadi konflik.

Menurut teori konflik politik yang dikemukakan oleh (Maswadi Rauf, 2003:23), terdiri dari berapa bagian teori konflik politik yaitu:

- a. Konflik sosial (termasuk konflik politik) adalah sebuah fenomena social penting yang memerlukan penyelesaian konflik (contlict resolution). Konflik sosial juga merupakan fenomena yang mempengaruhi pembuatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan. Semakin hebat konflik semakin sulit membuat keputusan yang mengikat semua.

- b. Konflik terjadi bila ada minimal dua pihak (individu atau kelompok) yang terlibat perbedaan pendapat. Perbedaan ini disadari oleh semuanya sehingga mereka tahu ada pihak lain yang bertentangan dengan pendapat mereka.
- c. Lawan dari konflik adalah konsensus. Konsensus yang juga disebut mufakat atau kesepakatan terjadi bila semua pihak mempunyai pendapat yang sama. Oleh karena itu terjadi konflik bila tidak ada konsensus, dan konsensus terjadi bila konflik berhasil dihilangkan.
- d. Konflik adalah sebuah fenomena sosial yang selalu ditemukan di dalam setiap masyarakat. Konflik tidak akan pernah bisa dihilangkan karena setiap hubungan sosial mempunyai potensi untuk menghasilkan konflik.
- e. Namun konflik dapat mengganggu hubungan sosial dan mengancam keberadaan masyarakat bila konflik berkembang terus (tanpa bisa diselesaikan) yang mengakibatkan disintegrasi sosial (dan disintegrasi politik). Masyarakat akan terbelah sesuai dengan polarisasi yang ditimbulkan oleh konflik.
- f. Semakin demokratis sebuah Negara, semakin besar kemungkinan terjadi konflik didalam masyarakat karena kebebasan berfikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat menghasilkan konflik yang meluas didalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Oleh karena itu salah satu persyaratan terpenting bagi demolrasi adalah adanya kemampuan dari pemerintah dan rakyat untuk menyelesaikan konflik sehingga tidak menimbulkan disintegrasi sosial dan disintegrasi politik.
- h. Penyelesaian konflik bisa ditempuh dengan cara persuasif (pendinginan) dan cara koersif(kekerasan).
- i. Ideal adalah cara penyelesaian konflik secara persuasif karenadigunakan secara rasional dalam bentuk musyawarah. Cara dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan bukanlah nilai-nilai manusia.
- j. Penyelesaian konflik secara persuasif hanya bisa dicapai bila pihak-pihak yang terlibat konflik tidak bersifat fanatik dan arogan sehingga bersedia menerima pendapat pihak lain dan mau mengurangi tuntutan sendiri. Hanya dengan cara begitu titik temu (kompromi) bisa dihasilkan.
- k. Kompromi tercapai bila pihak-pihak yang berkonflik menyetujui hal yang sama yang ada dalam pendapat yang dianut pihak-pihak yang berkonflik. Hal-hal yang ditentang oleh semua dibuang dengan persetujuan dari setiap pihak yang berkonflik. Hal-hal yang sama juga bisa diambil dari pendapat pihak lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik.
- l. Bila kompromi sulit dicapai, berarti konflik sulit diselesaikan. Yang terjadi kemudian adalah munculnya gangguan terhadap hubungan sosial yang harmonis dan kemungkinan terjadinya ancaman bagi keutuhan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak teori konflik batas wilayah ini berkembang di Indonesia termasuk juga sebagai penjabaran undang-undang dan pertauran pemerintah yang ada di negara ini, kerjasama antar daerah merupakan salah satu tema penting untuk memberikan solusi atas maraknya konflik-konflik sumber daya alam (SDA) dan konflik wewerung lainnya Menurut (Edward Azar, 2007.88), menyebutkan ada 4 pra-kondisi yang mengarah pada terjadinya atau pemicu konflik internal, yaitu:

- a. Hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas seperti suku, agama dan budaya
- b. dengan pemerintah. Pemerintah cenderung tidak mengakui eksistensi kelompok identitas tersebut dan bahkan berusaha mengeliminasinya demi kepentingan dan keutuhan negara. Akibatnya terjadi pertentangan terhadap kelompok identitas tertentu dan mendorong
- c. para anggotanya untuk melakukan perlawanan terhadap Negara/Pemerintah.
- d. Konflik juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah. Gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses kemiskinan. Proses secara ekonomi telah menciptakan kemiskinan sementara kekuatan ekonomi dan politik dari pusat menikmati surplus ekonomi sebagai hasil eksploitasi Sumber Daya Alam di daerah-daerah yang dilanda konflik.
- e. Sebab konflik internal berkaitan dengan karakteristik pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi politik dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pusat menyakini asumsi bahwa kekuasaan yang terpusat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sentral) menjamin kontrol yang efektif atas masyarakat. Bahkan kekuatan militer digunakan terhadap setiap bentuk protes atau perlawanan terhadap pemerintatran yang otoriter. Pemerintah daerah juga tidak dapat berfungsi sebagai alat perjuangan kepentingan masyarakat daerah dikarenakan elitelit daerah ikut menikmati eksploitasi Sumber Daya Alam.

- f. Konflik internal dikaitkan dengan International Linkages, yaitu sistem ketergantungan yang terjadi antara negara dengan sistem ekonomi global dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk lokal. Misalnya dalam rangka melindungi kepentingan investor asing pemerintah rela menindas rakyatnya sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

2.2.3 Konflik Agraria

Pertikaian atau pertentangan yang timbul karena adanya hak yang melanggar pada hak penguasaan atau kepemilikan lahan atau sumberdaya yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih biasanya konflik agraria ini dialami masyarakat adat atau petani yang mempertahankan lahannya dengan perusahaan yang mengklek sebuah lahan tersebut.

2.3 Batas Wilayah

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua wilaya yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah wilayah terbentuk dengan lahirnya negara. (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011:63). Kemudian Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional Depertemen Dalam Negeri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah mendefinisikan batas wilayah yaitu: “pemisah antara daerah satu dengan daerah lainnya, dimana dalam lingkup batas daerah itulah

dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah”. (Depdagri,2002:3). Artinya suatu kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. (Direktorat Perbatasan, 2002:2). Selanjutnya aspek wilayah menjadi suatu yang sangat penting sebab:

wilayah suatu daerah mencerminkan sejauh mana kewenangan daerah tersebut dapat dilaksanakan. Wilayah merupakan aspek yang dapat menunjang kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah karena dari wilayah dapat dihasilkan pajak dan retribusi daerah, dan juga bagi hasil sumber-sumber daya nasional. Bahkan luas wilayah merupakan variable dalam penentuan bobot yang mempengaruhi besarnya dana alokasi umum yang diterima daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 di defenisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, dalam permendagri no 45 tahun 2016 tentang pedoman dan penegasan batas desa, dijelaskan tujuan dan penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertip administrasi pemerintahan,memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas desa adalah batas wilayah administrasi pemerintah antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ingir / punggung gunung / pegunungan / medan sungai dan / atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Adapun tata cara penetapan penegasan dan pengesahan bunyi bab v pasal 9 permendagri no 45 tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di darat pada pedoman dokumen batas desa berupa peta rupa bumi, topografi, minuteplan, staatblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- b. Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang pembentukan daerah peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- c. Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati atau walikota dengan peraturan bupati atau walikota.
- d. Peraturan bupati atau walikota sebagai mana dimaksud dengan ayat (3) memuat titik koordinat batas desa yg diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati atau walikota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan pemendagri no 45 tahun 2016 tentang pedoman dan pengesahan batas desa berpedoman pada peraturan permendagri nomor 27 tahun 2006 penetapan dan penegasan batas desa yang telah dicabut dan tidak menjadi pedoman dalam penetapan batas desa.

Dengan demikian tujuan penyusunan pedoman penetapan dan penguasaan batas adalah mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan tertib dan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang memerlukan kepastian batas daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan daerah secara nyata dilapangan. (Direktorat Perbatasan, 2002:2). Pelaksanaan dan penepatan dan penegasan batas daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh masing-masing instansi yaitu:

- a. Tim PPBD dari Pusat dibentuk oleh Menteri dalam Negeri
- b. Tim Provinsi dibentuk oleh Gubernur Provinsi Riau
- c. Tim Kota Pekanbaru dibentuk oleh Walikota Pekanbaru

Tim desa koto tuo dengan tim desa selunak dibentuk oleh Bupati Masing-masing. Dari 5 Tim yang dibentuk inilah yang akan menentukan batas wilayah antara desa koto tuo dan desa selunak untuk dapat dijadikan pedoman bagi kedua wilayah untuk dipedomani sebagai batas administrasi dan pemerintah masing-masing desa.

Oleh karena itu batas daerah memiliki arti penting dan strategis apabila dibandingkan dengan era sebelumnya. Namun pada kenyataannya, arti penting dan strategis dari batas daerah belum diimbangi dengan kejelasan batas antar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengakibatkan konflik antar daerah.

2.4 Kecamatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan Otonomi Daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki 11 daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang - undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas

instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugastugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek

Sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai dari pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya

2.5 Pengertian Desa

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas.

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan 18 demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman2015:255)

2.6 Penyelesaian Konflik

2.6.1 Sistem Penyelesaian Sengketa Alternatif

Hanya sayangnya undang-undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa kecuali mengenai arbitrase.

Setiap masyarakat memiliki berbagai cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang dihadapi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif, dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga yang bersifat netral. Sebelum mengenal hukum tertulis cara yang ditempuh masyarakat adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat informal (hukum adat setempat).

Kemudian berkembang ke cara formal melalui lembaga-lembaga peradilan berdasarkan hukum tertulis, karena masyarakat tersebut secara berangsur-angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui oleh pemerintah sebab cara

itu dianggap lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum. Namun ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pengadilan saat ini menjadikan penyelesaian sengketa atau konflik mulai beralih dari penyelesaian dengan cara non litigasi.

2.6.2 Lembaga Penyelesaian Konflik

Didalam potret Politik Pasca Kejatuhan Soeharto (1999:10) ada dua cara penyelesaian konflik, yaitu:

- a. Penyelesaian konflik secara Persuasif Penyelesaian Konflik secara persuasif menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak yang berkonflik.
- b. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antar mereka saja maupun dengan mengikut sertakan denagan pihak lain sebagai moderator atau juru damai. Mereka yang terlibat dalam konflik melakukan tukar pikiran atau argumentasi untuk menunjukkan posisi masing-masing guna meyakinkan pihak lain bahwa pendapat merekalah yang benar,
- c. Musyawarah diharapkan membawa penyelesaian konflik dengan terjadinya perubahan-perubahan salah satu pihak yang terlibat sehingga perbedaan antara mereka dapat dihilangkan.
- d. Penyelesaian konflik secara Koersif (Kekerasan) Penyelesaian konflik secara koersif, menggunakan kekuatan fisik atau ancaman untuk menghilangkan perbedaan pendapat antar pihak-pihak yang terlibat konflik. Kekerasan fisik mencakup penggunaan bendabebda untuk merujuk secara fisik menyakiti, melukai atau membunuh pihak lain. Secara Koersif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan penyelesaian konflik dengan kualitas yang rendah, karena konflik yang sebenarnya belum selesai secara tuntas.

Dengan cara ini potensi bagi munculnya kembali konflik yang lebih hebat yang akan datang. Konflik baru bisa dikatakan berhasil diselesaikan apabila dapat dicapai konsensus antar pihak yang berkait. Konsensus adalah kesepakatan dimana semua pihak yang terlibat didalamnya berhasil mencapai kata mufakat bersama. Dalam kehidupan sosial adanya konflik sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari, banyaknya kepentingan menyebabkan lebih banyak konflik, apalagi dalam keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan merupakan salah satu negara berpenduduk paling padat di dunia.

Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (dispute resolution). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab

Sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan. Secara umum berdasarkan sifat proses dan putusannya, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan dalam:

- a. Proses adjudikasi, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan (antagonistis) dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutus bersifat kalah dan menang (win-lose) proses penyelesaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah peradilan (litigasi) dan arbitrase.

- b. proses konsensus, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama (cooperative) dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang (winwin). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi konsiliasi, ombudsman dan pencari fakta bersifat netral.
- c. proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini biasanya adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses yang dikolaborasikan.

Adapun proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan mini (mini trial), pemeriksaan juri secara sumir (summary jury trial), evaluasi netral secara dini (early neutral evaluation). Pemilahan antara sistem peradilan dan sistem penyelesaian sengketa alternatif dalam pembahasan pada bab ini adalah pemilahan antara proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan proses penyelesaian sengketa selain litigasi. Sistem penyelesaian sengketa alternatif yang akan diuraikan kemudian hanyalah sistem-sistem yang pelaksanaannya cukup populer di Indonesia seperti arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Dalam kasus penyelesaian konflik tapal batas antara desa koto tuo dengan desa selunak telah dilakukan beberapa cara diantaranya persuasif, musawarah,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perundingan. Pihak kecamatan kecamatan batang peranap telah bebrapa kali melakukan musawarah dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara kedua desa ini namun sampai sekarang belum ada kesepakatan antara kedua desa tersebut. Selain musawarah, juga pernah perundingan niniak mamak antara keduadesa tersebut yang mana mencari kepastian dimana tapal batas antara kedua desa tersebut, Menurut ninik mamak dari kedua desa tersebut batas wilayah berada di dekat pdam dan dekat aliran sungai kecil dekat dusun padang lalang tersebut namun, pihak pemerintah desa selunak tidak menyetujui batas wilayah yang di bilang ninik mamak atau pengulu adat dari kedua desa tersebut.

2.6.3 Lembaga Peradilan

Istilah peradilan dan pengadilan berasal dari kata dasar “adil” yang berarti meletakkan sesuatu pada semestinya. Kata peradilan dan pengadilan mempunyai arti yang berbeda akan tetapi terkadang dipakai untuk arti yang sama. Peradilan adalah sebuah sistem aturan yang mengatur agar supaya kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan, sedangkan pengadilan adalah sebuah perangkat organisasi penyelenggaraan peradilan, dan pengadilan inilah yang biasa disebut lembaga peradilan.

Lembaga peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam Undang-undang Nomar 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, pengadilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk rujukan atau acuan penelitian yang penulislakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

No	Nama Penelitian	Judul Peneliti	Keterangan
1.	Mursyidyansah (2015)	Konflik tampal batas antara kabupaten banjar dengan kabupaten tanahumbu Propinsi kalimantan selatan	Penelitian ini menganalisis tentang sebab utama konflik dengan analisa segitiga dimensi konflik. yang melibatkan dimensi personal, struktural dan kultural.
2.	Iza Rumesten RS. (2014)	Strategi hukum dan penerapan partisipasi masarakat dalam penyelesaian sengketa batas daerah sumatra selatan	Hasil penelitian ini membahas strategi hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas daerah yang terjadi sebagai akibat pemekaran daerah
3.	Lebertus subrata (2013)	Penetapan tampal batas di desa muara baru kecamatan sungai	Hasil penelitian ini menjelaskan konflik tata batas wilayah antara kabupaten sambas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		raya kabupaten kubu raya	kabupaten bakayang diindikasikan dengan belum di sepakatinya batas fisik dan beberapa titik batas	
	4.	Siti masyitah(2012)	Akna lilis konflik dalam penegasan batas wilayah antara kabupaten indragiri hilir dengan indra giri hulu	Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan konflik antara kabupaten inhil dan inhu hususnya kecamatan karitang dan danau rambai
	5.	Alkandi(2012)	Konflik batas wilayah di era otonom (studi kasus batas kecamatan kuantan tengah dan benai kuansing)	Penelitian ini membahas bagaimana pemerintah kuansing dalam menyelesaikan konflik batas wilayah daerah otonom

2.8 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Efendi (2003:43). Konsep adalah pemeknaan dari konsep yaang digunakan, untuk memudahkan penulis dalam mengoperasikan konsep tersebut dilapangan. Memudahkan dalam menganalisa penelitian ini ada beberapa konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian diantaranya adalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peran kecamatan batang pernap. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankantugasnya.kecamatan memiliki peran dalam penyelesaian konflik tampal batas antara desasesuai dengan keputusan permendagri no 45 tahun 2016 tentang pedoman dan penegasan batas desa.
- b. Konflik batas wilayah. Pertentangan antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing- masing memperjuangkan kepentingan atau objek yang sama, yaitu wilayah dan benda- benda yang berkaitan dengan tanah seprti air, tanaman, tambang dan lain-lain.
- c. Program kecamatan dalam menyelesaikan konflik program yang dijalankan untuk mencari jalan keluar dari persengketaan batas wilayah antara desa koto tuo dengan selunak yang sudah terjadi berlarut-larut dan sebagai tolak ukur baik aparat, pemerintah, atau pun daerah jika terjadi permasalahan yang sama program yang dilakukan kecamatan mengacu pada undang-undang tentang penenganan konflik serta peraturan permendagri no 45 tahun 2016 tentang pedoman dan penegasan batas desa.

2.9 Konsep Operasional

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbesa dari istilah yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini, maka disini ditemukan konsep operasional sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONSEP	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Teori konflik politik menurut Maswadi Rauf (2003:23)	-Persuasif -Koersif	-Musawarah -Perundingan -Negosiasi -Mediasi -Ancaman -Kekerasan -Teror

Sumber:Teori konflik Maswadi Rauf 2003

2.10 Pandanga islam

Berdasarkan dalil syari al-quran dan as-sunah setiap muslim taat kepada taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum.ini dibuktikan dengan surat Q.S AN-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(AL-Quran Surah An-Nisa. Ayat 59)*

Ayat 59 ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin.

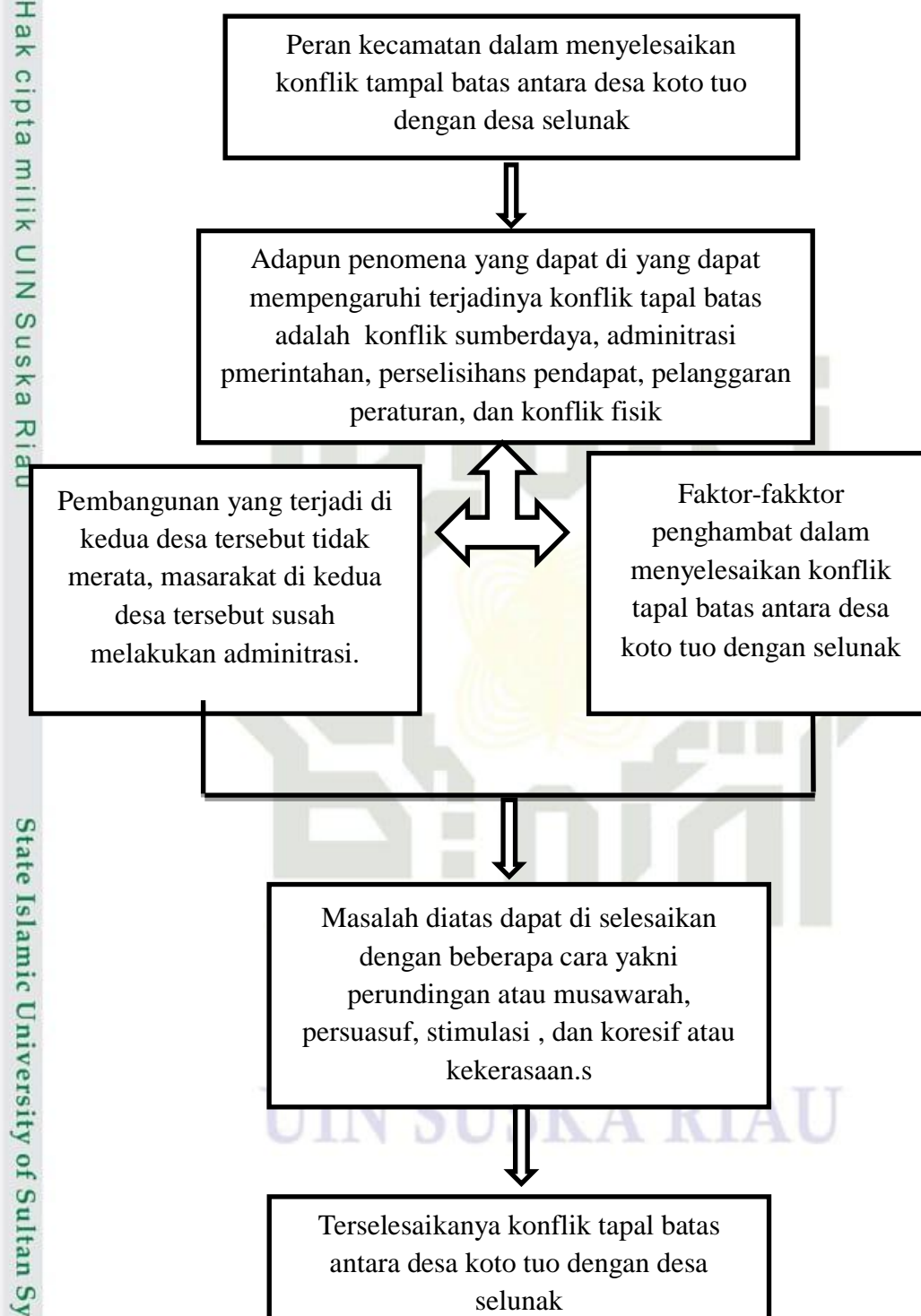
Taat dan patuh kepada perintah Allah SWT dengan mengamalkan isi kitab suci al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah SWT itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat.

Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah SWT untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Dia ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi al-Qur'an.

Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab al-Qur'an dan hadits. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah SWT.

Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada al-Qur'an dan hadits. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (kiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW

2.11 Kerangka Berpikir



Sumber :Olahan data peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan bagaimana dari keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menganalisisnya agar bisa menarik suatu kesimpulan.

3.2 Tempat Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah disebutkan maka lokasi penelitian ini adalah perbatasan wilayah antar desa koto tuo dengan desa selunak kecamatan batang peranap kabupaten indragiri hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Penelitian kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka atau dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau lambar. Dalam penelitian ini berupah latar belakang sejarah organisasi, struktur organisasi, dan data-data yang diambil dari dokumen organisasi (Sugiono, 2003:14)

3.3.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, dokumentasi, maupun Observasi. Berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang Penyelesaian Konflik dalam

Perbatasan Antara desa koto tuo dengan desa selunak, tepatnya di dusun padang lalang. Adapun data yang diperoleh dari narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan Konflik Perbatasan wilayah antara desa koto tuo dan desa selunak kecamatan batang peranap yang diantaranya:

- Jawaban responden terhadap kuesioner
- Jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara
- Dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah di publikasikan atau diolah oleh instansi yang terkait. Data ini dapat berupa arsip, buku-buku, literature, serta laporan tertulis yang berhubungan dengan Konflik Perbatasan wilayah antara desa koto tuo dengan desa selunak kecamatan batang peranap.

3.4 Teknik pengumpulan data

3.4.1 Observasi

Yaitu mengadakan peninjauan langsung lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang di perlukan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

3.4.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui

tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono 2007:157)

3.4.3 Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya. Adapun dokumentasi penelitian ini berupa foto-foto mengenai wawancara dan lain-lainnya.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan data, informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000:97), informan merupakan seorang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan penelitian ini adalah : Camat Batang Peranap, Sekertaris Kecamatan Batang Peranap, Kepala Desa Koto Tuo, Kepala Desa Selunak, Perangkat-Perangkat Desa, Masyarakat dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Singkat Kecamatan Batang Peranap

Kecamatan Batang Peranap merupakan pemecahan dari Kecamatan Peranap yang di resmikan pada tahun 2004 Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang terletak paling barat dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Topografi Kecamatan Batang Peranap berupa daratan dan DAS (daerah aliran sungai) dan desa Puntikayu merupakan Desa dengan Topografi paling tinggi sedangkan Desa Selunak dan Koto Kuo merupakan Desa dengan Topografi paling rendah.

Secara geografi letak Kecamatan Batang Peranap berada pada posisi strategis sebagai jalur lintas sungai Indragiri dan sungai Batang Peranap serta jalur yang menghubungkan Kecamatan Batang Peranap dengan Batang Cenaku sampai ke Kabupaten Tebo Propinsi Jambi.

Batas wilayah Kecamatan Batang Peranap :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Peranap
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tebo (Prov. Jambi)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Peranap
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kecamatan Batang Peranap terdiri dari 10 Desa yaitu : Pematang, Selunak, Sukamaju, Pematang Benteng, Koto tuo, Punt kayu, Pesajian, Sungai aur, Sencano Jaya dan Peladangan, jumlah penduduk di kecamatan Batang peranap yaitu terdiri dari 26.489 orang, jumlah penduduk kecamatan batang peranap bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.1 jumlah penduduk kecamatan batang peranap

No	Nama Desa	Jumlah penduduk
1	Pematang	721
2	Selunak	1.189
3	Sukamaju	1.293
4	Pematang benteng	938
5	Koto tuo	459
6	Punt kayu	2.056
7	Pasajian	1.449
8	Sungai aur	831
9	Sencano jaya	914
10	Peladangan	603
10	Jumlah populasi	8.980

Sumber: kantor camat batang peranap tahun 2017

Sebagian besar masyarakat Batang Peranap bermata pencarian sebagai petani karet dan sawit, dan ada sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai honorer dan pedagang, dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.2 di bawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1.2 Dftar mata pencarian masarakat batang peranap

No	Mata pencarian masarakat	Jumlah
1	Petani karet	5845 Orang
2	Petani kelapa sawit	2160 Orang
3	Pedagang	650 Orang
4	Pns/honoror	575 Orang

Sumber : kantor camat batang peranap 2017

Untuk sarana pendidikan di kecamatan Batang peranap terdapat 2 Taman Kanak-kanak (TK), 11 Sekolah Dasar (SD), 8 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), 3 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.1.3 Sarana Pendidikan Di Kecamatan Batang Peranap

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	9
2	Sekolah Dasar (SD)	13
3	Madrasah diniyah Awaliyah (MDA)	8
4	Sekolah Menengah Pertama (SLTP)	3
5	Sekolah Menegah Kejuruan (SMK)	2

Sumber : Kantor Camat Batang Peranap tahun 2017

Untuk sarana ibadah disetiap desa terdapat mesjid dan mushollah serta 1 gereja di Desa Punti kayu dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel IV.4 dibawah ini:

Tabel 4.1. 4 Sarana Ibadah Di Kecamatan Batang Peranap

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	16
2	Mussolah	32
3	Gereja	13

Sumber : Kantor Camat Batang Peranap tahun 2017

4.2 Tupoksi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kantor Camat Batang Peranap dituangkan dalam sebuah keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun uraian tugas Pejabat Kantor Camat di Kabupaten Indragiri Hulu seperti salah satunya di Kantor Camat Batang Peranap, sebagai berikut :

- Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasi upays penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Mengkoordinasi penerapan, penegakan, peraturan perundang-undangan.
- Mengkoordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.
- Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- i. Membina dan melaksanakan kesekretariatan kecamatan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

4.3 . Struktur Organisasi

Jumlah pegawai kantor camat batang peranap terdiri dari 22 orang yaitu 12 orang pegawai negeri sipil dan 10 orang pegawai honorer. Sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Indragiri Hulu, pemerintah Kecamatan Batang Peranap mempunyai struktur sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Kasubag Keuangan
- d. Seksi Pemerintahan
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- f. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan.
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial
- h. Seksi Pelayanan Umum
- i. kelompok jabatan fungsional

4.4 Visi dan Misi Kantor Camat Batang Peranap

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Batang Peranap, selalu mengacu pada visi dan misi Kabupaten Indragiri Hulu “Indragiri Hulu Sejahtera 2017 ”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai tolak ukur dan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan.

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen renstra SKPD sebagai hasil analisis sebelumnya .

Visi menjelaskan arah suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Disini visi diciptakan melampaui realitas sekarang.

- a. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai, tetapi dengan fokus pada masa depan. Pertanyaan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi Kecamatan Batang Peranap adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Dan Misi Kecamatan Batang Peranap baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Sebagai gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan agar tetap eksis, inovatif dan produktif. Disamping itu visi merupakan suatu cara pandang jauh kedepan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemerintah Kecamatan batang Peranap. Dengan ini Pemerintah Kecamatan Batang Peranap menjabarkan visinya yaitu : Dalam mewujudkan visi Kecamatan Batang Peranap menetapkan Misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan potensi Sumber Daya yang terkandung di wilayah Kecamatan Batang Peranap

- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan pelayanan publik serta menciptakan kondisi wilayah Kecamatan Batang Pranap yang konduktif
- c. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan. Strategi yang diambil dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Batang Peranap adalah :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya.
 - b. Meningkatkan pendidikan dan aparatur.
 - c. Meningkatkan kuantitas pelayanan publik berdasar SOP.
 - d. Penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial dalam memberdayakan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan strategi pembangunan adalah :
 - a. Meningkatkan koordinasi isnstansi terkait dalam pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan perundang-undangan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
 - b. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan.

4.5 Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Batang Peranap

1. Tujuan

- a. Meningkatkan dan optimalnya pemanfaatan sumber daya Kecamatan Batang Peranap sesuai perencanaan yang baik dan berkualitas.
- b. Meningkatkan sarana jalan/transportasi
- c. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
- d. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan.

2. Sasaran

- a. Tercapainya pemanfaatan sumber daya yang optimal
- b. Meningkatnya kualitas dan pembukaan jalan baru dengan jalan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.
- c. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
- d. Meningkatkan kualitas layanan publik
- e. Meningkatnya keamanan dan ketertiban
- f. Meningkatnya kelembagaan ekonomi dan sosial
- g. Meningkatkan kelembagaan pembangunan desa

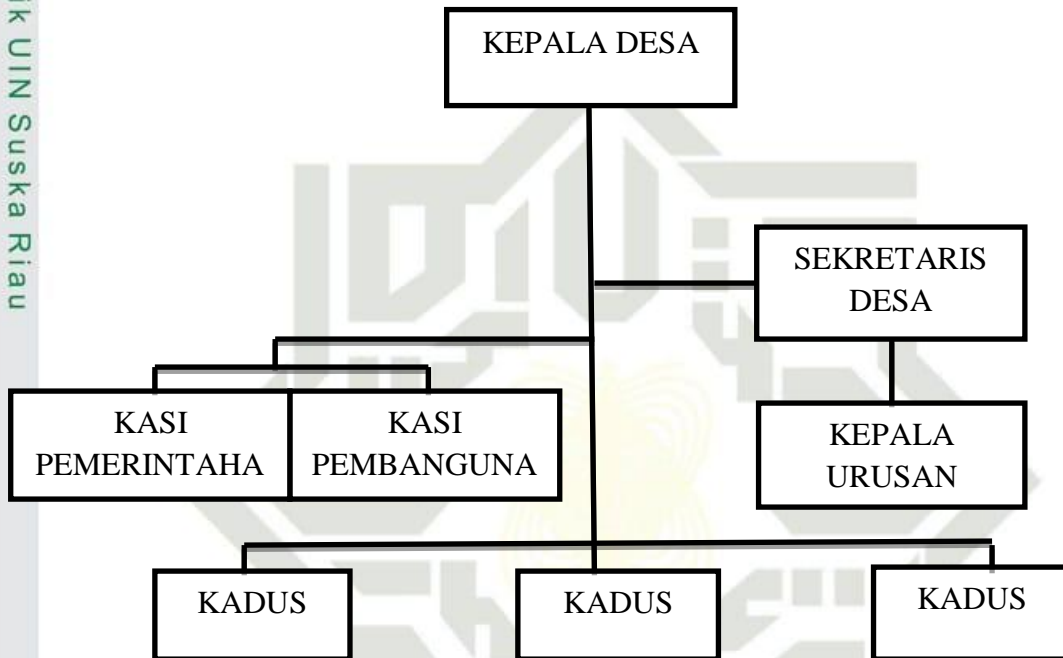
4.6 Gambaran Umum Desa koto tuo

Desa Koto Tuo merupakan satu dari sepuluh desa di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki jumlah penduduk sekitar 459

penduduk, berjenis kelamin laki-laki sekitar 242 dan berjenis kelamin perempuan sekitar 217

4.6.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa koto tuo No 2 Tahun 2015

GAMBAR 4.6.1 Struktur Organisasi Pemerinahan Desa koto tuo



4.6.2 Sarana dan Prasarana Desa koto tuo

Sarana Pendidikan :

- MDA
- TK Adelwes

Jumlah Guru :

- MDA Koto tuo berjumlah 7 Guru
- TK Adelwes berjumlah 3 Guru

Jumlah Murid :

- MDA Siswa/siswi berjumlah 55 Orang
- TK Adelwes Siswa/siswi berjumlah 12 Orang

Sarana Ibadah :

- Mesjid AL-IKHLAS

Sarana Kesehatan :

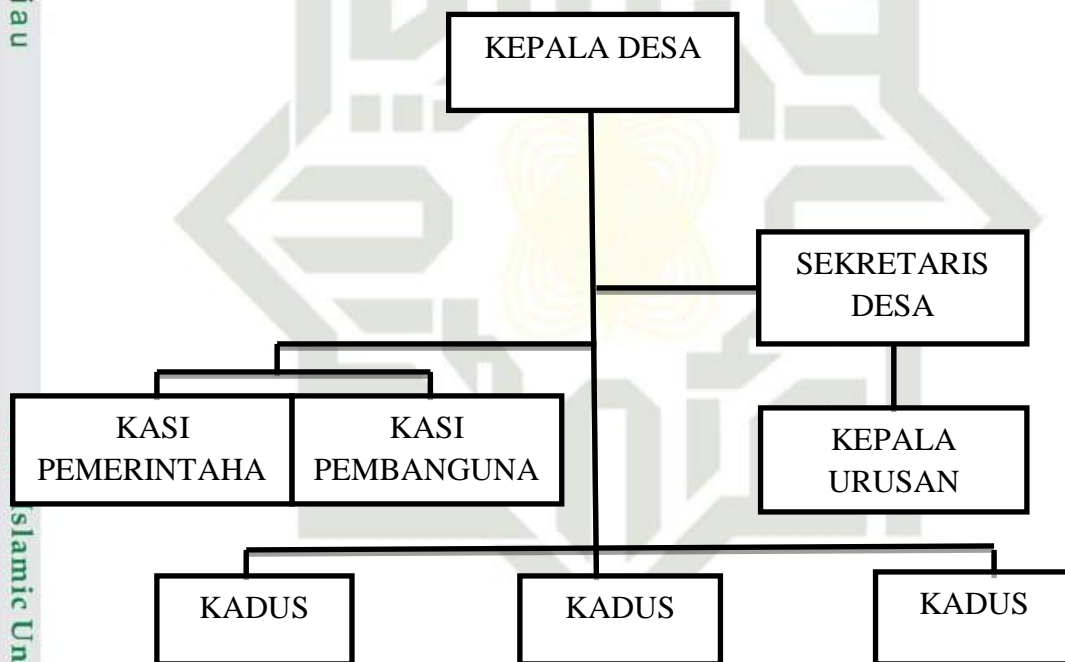
- Puskesmas

4.7 Gambaran Umum Desa selunak

Desa Selunak merupakan satu dari sepuluh Desa di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1.189 penduduk, berjenis kelamin laki-laki sekitar 589 dan berjenis kelamin perempuan sekitar 600

4.7.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa selunak No 2 Tahun 2015

GAMBAR 3.1 Struktur Organisasi Pemerinahan Desa koto tuo



4.7.2 Sarana dan Prasarana Desa Selunak

Sarana Pendidikan :

- SDN OO5 Selunak
- .SMKN 1 Batang Peranap
- TK Bunga Kenari

Jumlah Guru :

- SDN OO5 Selunak berjumlah 18 orang
- SMKN 1 Batang peranap berjumlah 24 orang
- TK Bunga Kenari berjumlah 5 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah Murid :

- SDN OO5 Selunak Siswa/siswi berjumlah 211 Orang
- SMKN 1 Selunak Siswa/siswi berjumlah 357Orang

Sarana Ibadah :

- Mesjid AL-alhuda
- Mejid AL- jamik

Sarana Kesehatan :

- Puskesmas





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Peneliti ini meneliti tentang peran Camat Batang eranap dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak Kabupaten Indra Girihulu. Sebagai bab penelitian ini, maka bab 6 ini disampaikan kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini husunya dari hasil pengumpulan data yang dipakai peneliti dari informan penelitian dan analisa data yang didapat dilapangan. Kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran camat batang peranap dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara desa koto tuo dengan desa selunak kabupaten indra giri hulu di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

6.1.1 Peran Camat Batang Peranap Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antara Desa Koto Tuo Dengan Desa Selunak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan bahwa penyelesaian konflik tapal batas antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak yang dilakukan pihak Camat Batang Peranap terdapat beberapa masalah karena hal ini dakarenakan belum mampunya pihak Kecamatan dan Desa dalam menemukan solusi agar konflik ini tidak terulang lagi. Sehingga menjadi suatu masalah yang harus dibenahi oleh pihak Kecamatan maupun Desa. Pihak Kecamatan harus menemukan solusi secepat mungkin dan tepas sasaraan

agar tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak, dan menyelesaikan konflik yang telah cukup lama terjadi.

Peran Camat Batang Peranap dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang di peroleh dari beberapa responden masih belum cukup baik dapat dilihat belum selesainya konflik ini sampai sekarang, meskipun pihak kecaamaan telah melakukan mediasi dan musawarah belum menemukan hasil sampai sekarang

Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak hal ini menyebabkan penyelesaian yang di berikan terhambat dan tidak mendapatkan hasil yang baik dimana masalah tersebut sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

6.1.2 Faktor Penghambat Camat Batang Peranap Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antra Desa Koto Tuo Dengan Desa Selunak.

Selanjutnya dadapun hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian konflik tapal batas antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak petama adalah lambanya pihak kecamatan dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak , meskipun pihak kecamatan sudah melakukan mediasi, musawarah, dan membentuk tim pelacakan batas wilayah natara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak namun sampai sekarang belum ada hasil agar konflik ini tidak terjadi lagi yang kedua, Desa Selunak dan Koto Tuo saling mengklm batas wilayahnya masing- masing sehingga

menimbulkan keraguan dalam menentukan batas wilayah antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak. Sehingga manfaat dari pembentukan tim pelacakan batas wilayah yang di bentuk kecamatan belum ada hasil. Yang ketiga, kurangnya anggota atau pesonil tim pelacakan batas wilayah sehingga menyulitkan mereka dalam menentukan batas wilayah antara Desa Koto Tuo dengan desa Selunak. Yang keempat tidak adanya kucuran dana baik itu dari pihak kecamatan maupun dari desa sehingga menyulitkan pihak tim pelacakan batas wilayah antara Desa Koto Tuo dan Selunak melakukan kegiatan pelacakan batas wilayah, sehingga batas wilayah antara Desa Koto Tuo dengan Selunak tidak selesai sampai sekarang.

6.2 Saran

- A. Pemerintah Kecamatan sesegera mungkin menyelesaikan konflik tapal batas antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak agar konflik susulan tidak terjadi lagi
- B. Pemerintah Kecamatan harus mengambil keputusan yang kongkrit dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak agar tidak ada pihak yang dirugikan.
- C. Pihak Kecamatan harus menambah anggota atau personil tim pelacakan batas wilayah antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak.
- D. Pihak Kecamatan harus menyiapkan anggaran dana untuk menunjang semua kegiatan dari tim pelacakan tapal batas agar kerja mereka maksimal dan masalah batas wilayah Koto Tuo dengan Selunak selesai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- E. Pihak Kecamatan harus minta bantuan secara landung kepada Kabupaten atau Provinsi agar membantu dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak bukan hanya memberi saran atau masukan saja





DAFTAR PUSTAKA

- Dwimarwoko . bagong suyanto .2006 *sosiologi teks pengantar dan terapan*. Jakarta: kencana
- Hermanto . winarno 2009.*ilmu sosial dan budaya dasar*. Jakarta timur: PT bumi aksara
- Philipus . Nurul aini .2004. *sosiologi dan politik* . jakarta: PT Raja grapindo persada.
- Pruitt. Dean. G . jefry Robin, *tori konflik sosial (terjemahan)*, putaka belajar.
- Pruitt. Robin. 2008 *Teori konflik sosial* Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Susan novri . 2017. *Pengantar sosiologi konflik*. Surabaya: pernanda media
- Susan. 2009 . *Sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: prestasi pustaka
- Singaribuan masri. Effendi sofian 2006 metode penelitian survai, Jakarta barat: pustaka LPES
- Soekanto soerjono. 2009. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: rajawali fers
- Sugiyono. 2012 metode penelitian kuantitatif kuantitatif dan r&d. Bandung : alfabeta cv
- Wirwan . 2010. *Konflik dan manajemen konflik teori aplikasi dan penelitian*.jakarta : selemba hamka
- Jurnal M. arifat hermana .2015 *Hambatan penyelesaian sengketa tambal batas antara Kabupaten bangkulu utara dengan kabupaten lebong berdasar hukum adminitrasi negara/ hukum ketatanegaraan bangkulu jurnal hukum sahasen*. Vol .No. 1
- Jurnal Risman, H. 2015 *Upaya pemerintah daerah kabupaten kutai barat dalam menyeleisikan konflik tampal batas antara kampung di daerah kabupaten kutai barat (konflik kampung muhur dan kampung kaliq)*. Ejurnal pemerintahan integratif 2015. Vol 3 .No. 2



Jurnal Dumanaw, Tervina, *Penyelesaian konflik sengketa tampal batas antara kabupaten minahasa utara dan kota bitung*. Volume 1 No.1

Jurnal Rahmad lalu ahmad *study kebijakan penanganan konflik batas daerah dalam era otonomi daerah*. Volume 1 No. 1

Skripsi Siti masyitha. 2012. *Penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah antara kabupaten indragiri hilir dengan kabupaten indragiri hulu (studi kasus perbatasan wilayah desa sencalang kecamatan keritang Kab.Inhil dengan desa danau rambai Kec. Inhu)*

Skripsi Alkindi. 2012. *Konflik batas wilayah di era otonom (Studi kasus konflik tampal batas kecamatan kuantan tengah dengan kecamatan benai di kabupaten Kuantan Sengimgi)*

Skripsi Muhammad Solichin. 2017 *konflik tampal batas antara kabupaten mesuji dan kabupaten tulang bawang*

Permendagri no 45 tahun 2016 pedoman dan pengesahan batas desa

Undang- undang nomor 23 tahun 2014

Undang-undang nomor 6 tahun 2014

Peraturan permendagri nomor 27 tahun 2006 penetapan dan penegasan batas desa

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran : Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN CAMAT BATANG PERANAP DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA DESA KOTO TUO DAN SELUNAK

Identitas Peneliti

Nama : Kardo Handika
Nim : 11575105222
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : UIN Suska Riau

Informan Penelitian

Nama : Watno, S.Sos
Jabatan : Camat batang peranap dan masarakat

Kegiatan wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang penyelesaian konflik tapal batas antara desa koto tuo dengan selunak dengan terlaksananya kegiatan ini peneliti berharap diberikan kemudahan saat melakukan wawancara

1. Persuasif

- a. Menurut Bapak langkah2 apa saja yang harus dilakukan agar konflik ini tidak berkepanjangan?
- b. Langkah_langkah apa saja yang telah bapak lakukan dalam menyelesaikan konflik ini ?
- c. Apa sebenarnya akar dari konflik konflik ini?
- d. Kapan konflik ini mulai terjadi?
- e. Menurut Bapak apa saja faktor_faktor hambatan dalam menyelesaikan konflik ini?
- f. Siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan konflik ini (Kekuasaan,Kepentingan,Aktor-aktor) dalam menyelesaikan ini?
- g. kebijakan apa saja yang telah bapak buat dalam menyelesaikan konflik ini?
- h. Apa dampak yang diterima oleh masyarakat/individu akibat konflik ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Adakah fasilitas umum yang rusak selama konflik ini terjadi?
- j. Apa saja tanggapan masyarakat terhadap konflik ini?
- k. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan konflik ini?

B. Koresif

- a. apakah pernah terjadi konflik fisik atau pertikaian antara kedua desa tersebut
- b. apa dampak yang telah ditimbulkan selama konflik itu terjadi?
- c. kapan konflik itu terjadi?
- d. apa penyebab konflik itu bisa terjadi?
- e. adakah korban yang ditimbulkan selama konflik terjadi?
- f. kerugian apa saja yang telah ditimbulkan selama konflik terjadi?
- g. apa yang bapak Rasakan pada saat konflik terjadi?
- h. selama ini apakah bapak mengetahui langkah-langkah apa yang telah di tempuh kecamatan dalam menyelesaikan konflik ini?
- i. adakah pihak kabupaten atau provinsi turun langsung dalam menyelesaikan konflik ini?
- J. apakah bapak mengetahui alasan mengapa konflik ini tidak selesai sampai sekarang?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 11: Dokumentasi wawancara informant

Sekretaris camat batang peranap



Wawancara dengan kepala desa dan masarakat desa koto tuo dan selunak



Gambar 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341211, 341609
 Email. info@dpmpptsp.inhukab.go.id Website. www.dpmpptsp.inhukab.go.id
R E N G A T

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 30/DPMPPTSP/NON IZIN-PENELITIAN/II/2019

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat keterangan penelitian;
 2. Permohonan Yang bersangkutan
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/17612 21 Januari 2019
- Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu**, memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama : **KARDO HANDIKA**
 2. NIM : **11575105222**
 3. Jenjang : **S1**
 4. Alamat : **Desa Pesikaian Kec. Cerenti**
- Untuk** : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Judul Penelitian : **PERAN CAMAT BATANG PERANAP DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA DESA KOTO TUO DENGAN DESA SELUNAK**
 - b. Tujuan Penelitian : **UNTUK MENGETAHUI PERAN CAMAT BATANG PERANAP DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA DESA KOTO TUO DENGAN DESA SELUNAK**
 - c. Lokasi Penelitian : **DESA KOTO TUO DAN SELUNAK KEC. BATANG PERANAP**
 - d. Waktu Penelitian : **3 (TIGA) BULAN**
 - e. Bidang Penelitian : **ADMINISTRASI NEGARA**
 - f. Status Penelitian : **PERSEORANGAN**
 - g. Penanggung Jawab / Koordinator / Anggota Peneliti : **FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**
 - i. Nama lembaga : **UIN SUSKA RIAU**
- Ketentuan yang harus ditaati adalah :
- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
 - b. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah.
 - c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Surat Keterangan Penelitian ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Rengat
Pada Tanggal : 06 Februari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Ir. SUSENO ADJI MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19601213 198903 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Indragiri Hulu.
2. UIN Suska Riau – Pekanbaru
3. Arsip



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 16 Januari 2019 M
9 Jumadil Awwal 1440 H

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/613/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Kardo Handika
NIM. : 11575105222
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Peran Camat Batang Peranap dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas
Antara Desa Koto Tuo Dengan Desa Selunak" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/17612
T E N T A N G



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/613/2019 Tanggal 16 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | KARDO HANDIKA |
| 2. NIM / KTP | : | 11575105222 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN CAMAT BATANG PERANAP DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA DESA KOTO TUO DENGAN DESA SELUNAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Januari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Penyampaian :

Penyampaian Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

Bupati Indragiri Hulu

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat

n Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN BATANG PERANAP**

Jalan Dwi Marta KM. 3 Selunak Telp. 0828648310.

SELUNAK

SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENGUMPULAN DATA

Nomor : 274/PEM-KEC.BP/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini camat batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan bahwa :

Nama	: KARDO HANDIKA
Nim	: 11575105222
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Study	: Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Peran Camat Batang Peranap Dalam Menyelesaikan konflik Tapal Batas Antara Desa Koto Tuo Dengan Desa Selunak

Nama Mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan penelitian/pengumpulan data di desa selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Pada tanggal 02 Juli 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Selunak
Pada tanggal : 02 Juli 2019

A.n Camat batang peranap
Sekcam



FERISMAN.A.S.SOS

NIP. 196707271990071002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

in Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN BATANG PERANAP

DESA SELUNAK

JL.Kayu Batu RT 002 / RW 001

Pos :29354

SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENGUMPULAN DATA

NO: 140/SLK/2019/145

Kepala Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Kardo Handika
Nim	: 11575105222
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Study	: Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Peran Camat Batang Peranap Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antara Desa Koto Tuo Dengan Desa Selunak

Nama Mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan penelitian/ pengumpulan data di Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Pada Tanggal 02 Juli 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : SELUNAK

PADA TANGGAL : 02 Juli 2019

a.n KEPALA DESA SELUNAK

(SEKDES)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU KECAMATAN BATANG PERANAP DESA KOTO TUO

Alamat : Jl. Kayu Batu No. 95 Desa Koto Tuo

Kode Pos 29354

SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENGUMPULAN DATA

Nomor : /KT/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Koto Tuo Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan bahwa :

Nama : **KARDO HANDIKA**
 Nim : 11575105222
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Study : Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekanbaru
 Judul Penelitian : **Peran Camat Batang Peranap Dalam Menyelesaikan konflik Tapal Batas Antara Desa Koto Tuo Dengan Desa Selunak**

Nama Mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan penelitian/pengumpulan data di Desa Koto Tuo Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Pada tanggal 02 Juli 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Koto tuo
 Pada tanggal : 02 Juli 2019



Kepala Desa Koto Tuo

SAIDUL BAHRI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Kardo Handika, Lahir di Pesikaian, Kuantan Sengingi pada tanggal 10 September 1995. Merupakan anak Kedua dari empat (4) bersaudara. Ayah bernama Siatan dan ibu bernama Yusni . Pada Tahun 2009 penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD 006 Desa Pesikaian . Pada Tahun 2012 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama 02 Pulau Panjang Cerenti dan pada Tahun 2015 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas 01 Cerenti. Dan pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur UMJM. Dan penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada Tahun 2018 di Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi dan di Tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Koto Tuo Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Berkat Rahmat Allah SWT pada tanggal 18 Oktober 2019 penulis telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan tugas akhir atau skripsi yang berjudul **“Peran Camat Batang Peranap Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak**